



Dapil Umbulharjo-Kotagede Dipisah

■ KPU Kota Yogyakarta Bahas Revisi Daerah Pemilihan

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menggelar Uji Publik Usulan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Hotel Santika, Sabtu (10/2).

Terdapat tiga usulan dapil yang dipaparkan oleh KPU Kota Yogyakarta. Dapil Pertama sama seperti Dapil pada Pemilu 2014 hanya saja berbeda di jumlah kursi. Pada tahun 2014, untuk Dapil 4 kuotanya adalah 7 kursi dan Dapil 5 kuotanya adalah 9 kursi.

"Untuk draf 1 usulan Dapil untuk Pemilu 2019, Dapil Kota Yogyakarta 4 sebanyak 6 kursi dan Dapil Kota Yogyakarta 5 sebanyak 10 kursi," jelas Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto.

Selanjutnya, untuk rancangan draf 2, dapil yang semula berjumlah lima diusulkan menjadi enam dapil. "Umbulharjo dan Kotagede dipisah. Masing-masing Dapil 5 untuk Umbulharjo dengan 7 kursi dan Dapil 6 Kotagede dengan 3 kursi," bebernya.

Sementara itu, untuk rancangan draf 3 yang berubah adalah jumlah kursi yang berada di Dapil 2 dan 4 untuk jumlah kursi yang masing-masing 8 kursi dan 7 kursi.

Pada uji publik tersebut, berbagai pihak yang berasal dari perwakilan partai politik (parpol), lembaga, dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurkan pandangan mereka. Seluruh partai politik menyatakan jawaban yang sama untuk menyetujui rancangan draf 1 karena tidak jauh berbeda dengan Dapil di Pemilu 2014.

Satu di antaranya adalah perwakilan dari PKS, yakni Syafiq. Ia menurkan rancangan yang paling sesuai adalah yang draf 1. "Selain itu juga kalau ada perubahan seperti ini terlalu mepet dengan pendaftaran caleg. Hal ini akan menyulitkan partai," bebernya.

Hal serupa juga dikemukakan Perwakilan Pengurus Muhammadiyah Daerah Kota Yogyakarta, Samuk Sandi. "Mestinya sejak awal (disosialisasikan). Paling nggak setelah selesai Pemilu bentuk Dapil. Kalau sudah mepet seperti sekarang mending pakai opsi lama," bebernya. Ia menjelaskan, bahwa konsekuensi yang muncul bila dapil berubah setahun sebelum Pemilu, maka mereka yang sudah memiliki konstituen akan terhalang kesempatannya untuk dipilih.

Pada rancangan draf 1 terdapat 5 Dapil dengan kuota 40 kursi. Dapil Kota Yogyakarta 1 meliputi Kraton, Mantrijeron, dan Mergansan dengan kuota 10 kursi, Pakualaman, dan Wirobrajan dengan kuota 7 kursi. Dapil Kota Yogyakarta 3 meliputi Gedongtengen, Jetis, dan Tegalarjo dengan kuota 8 kursi. Dapil Kota Yogyakarta 4 meliputi Danurejan dan Gondokusuman dengan kuota 6 kursi. Dapil Kota Yogyakarta 5 meliputi Kotagede dan Umbulharjo dengan kuota 3 kursi.

STORY HIGHLIGHT

- KPU Kota Yogyakarta mengusulkan tiga draf dapil pada pemilu 2019
- Dari tiga usulan, draf pertama cenderung disetujui parpol dan OPD karena tak jauh berbeda dengan pemilu 2014
- Namun, usulan yang hanya berjarak satu tahun sebelum pemilu dianggap terlalu mepet
- Banyak masukan jika perubahan dapil seharusnya dilakukan setelah pemilu usai

DENGAR PENDAPAT - Uji Publik Usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam Pemilu 2019 di Hotel Santika, Sabtu (10/2).

TRIBUN JOGJA/REISBATUL HIDAYAH

- KPU Kota Yk ✓ Netral

Bisa Memicu Keributan

KEPALA Kesbang Kota Yogyakarta, Sukamto menegaskan bahwa untuk Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta harus berjalan dengan baik dan semua harus mematuhi aturan yang berlaku.

"Saya menginginkan pertandingan besok itu aman dan nyaman. Kondusifitas Kota Yogyakarta juga terjaga," bebernya, dalam Uji Publik Usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam Pemilu 2019 di Hotel Santika, Sabtu (10/2).

Ia pun menyinggung soal perubahan dapil yang justru akan memancing keributan. Pasalnya para politisi telah menjalin komunikasi dengan dapilnya masing-

masing untuk memperoleh dukungan suara pada Pemilu 2019 mendatang.

"Coba ini jadi bahan evaluasi. Perubahan dapil mau jadi lima atau enam sebenarnya tidak masalah. Asal disampaikan jauh-jauh hari sehingga mereka bisa lebih awal melakukan pemetaan," ujarnya.

Tak lupa, Sukamto meminta agar KPU Kota Yogyakarta yang akan melaporkan hasil Uji Publik melalui KPU DIY tersebut untuk memberikan catatan khusus. "Kalau diusulkan ke Jakarta, walaupun yang memutuskan KPU pusat, tetap diberi catatan. Ini demi kondusifitas Kota Yogyakarta," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005